

Gerai Investasi
KOTA MAGELANG



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJ IP)

2022

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

dpmptsp
Kota Magelang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alamat: Jl. Veteran No. 7 Telp./Fax. 0293-314663, 361775
Website : <http://dpmptsp.magelangkota.go.id>
SMS Center 0857-9999-6000
KOTA MAGELANG 56117

LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
TAHUN 2022



DINAS ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Magelang, 25 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
SEKRETARIS DPRD KOTA MAGELANG



INDAH DWIANTARI, S. Sos
NIP . 19720429 199703 2 002
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	6
D. Landasan Hukum	14
E. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	47
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	60
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	60
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	63
MATRIKS RENSTRA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Magelang	6
---------------------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.....	19
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	21
Tabel 2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	24
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021	25
Tabel 2.5	: Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021	26
Tabel 2.6	: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021 ...	29
Tabel 2.7	: Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021	29
Tabel 3.1	: Pengkategorian Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.....	34
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja.....	38

Tabel 3.4	: Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	40
Tabel 3.5	: Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	41
Tabel 3.6	: Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	41
Tabel 3.7	: Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan..	45
Tabel 3.8	: Anggaran Tahun 2021.....	49
Tabel 3.9	: Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	51
Tabel 3.10	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	55
Tabel 3.11	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mempunyai tugas : membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DPMPSTP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu :

1. Kepala Dinas

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Sekretariat

Membantu Kepala Dinas PMPTSP dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi program dan keuangan dengan penunjukan Subkoordinator untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subkoordinator tersebut yaitu :

- Subkoordinator Program yang melaksanakan fungsi teknis di bidang Program yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang program.

- Subkoordinator Keuangan yang melaksanakan fungsi teknis di bidang Keuangan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Membantu Kepala Dinas PMPTSP untuk melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP. Dalam pelaksanaan tugas teknis tersebut ditunjuk Koordinator untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan yang meliputi :

1. Koordinator Penanaman Modal

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dibantu oleh Subkoordinator yaitu :

a. Subkoordinator Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

b. Subkoordinator Promosi Penanaman Modal.

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi.

c. Subkoordinator Pengawasan;

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan penanaman modal.

d. Subkoordinator Pengendalian;

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian Penanaman Modal.

2. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan serta penanganan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan perizinan dan non perizinan. Dalam

melaksanakan tugasnya Koordinator dibantu oleh Subkoordinator yaitu :

a. Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelayanan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pada administrasi perizinan

b. Subkoordinator Penanganan Pengaduan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan

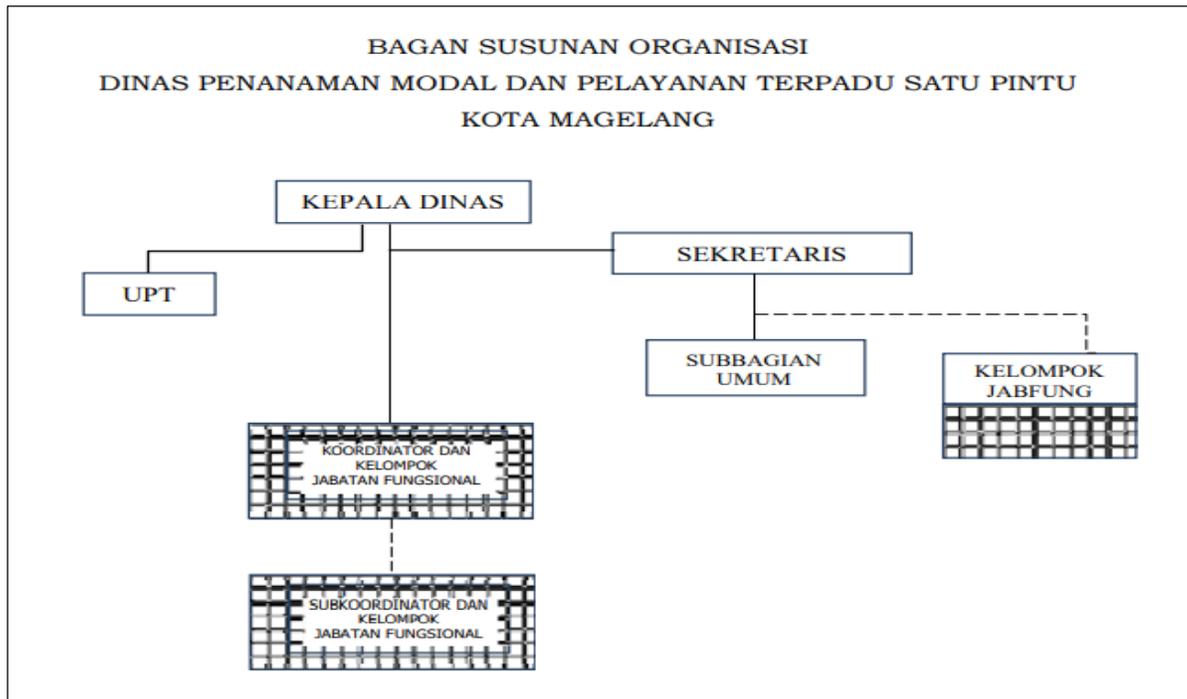
c. Subkoordinator Peningkatan Layanan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan layanan

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Magelang



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Langkah percepatan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pusat pelayanan yang modern dan terintegrasi harus menjadi budaya penyelenggara. Dimana akan tergabung OPD dan instansi vertikal dalam memberikan pelayanan publik terintegrasi di satu tempat/bangunan. Masyarakat bisa mengurus KTP, SIM, Paspor dan membayar di satu tempat. Bangunan MPP harus memenuhi syarat bisa melayani masyarakat berkebutuhan khusus, ramah untuk ibu dan anak serta berada di lokasi strategis.
2. Regulasi Baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap kebijakan dan mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian perizinan dan non perizinan (Risk Based Approach) dan penyesuaian kelembagaan DPMPTSP dimana akan dilaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
3. Implementasi OSS versi RBA sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengajuan izin usaha. Bagaimana mensosialisasikan dan membudayakan masyarakat untuk berperan secara aktif dan mandiri dalam pengajuan izin melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi dan menekankan pada porsi fungsi pengawasan terintegrasi yang lebih besar.
4. Daya Saing Ekonomi dan iklim investasi Dari capaian investasi 5 tahun terakhir, masih banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih terkendala. Belum optimalnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang dan banyak izin usaha yang belum efektif berakibat belum optimalnya realisasi investasi di Kota Magelang dari hasil pemantauan LKPM.

5. ~~5. Pembangunan Berkelanjutan~~
dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs diantaranya meliputi Penghapusan Kemiskinan, Kesetaraan Gender, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang layak, dan Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kota Magelang mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-~~...~~.
6. Pengarusutamaan Gender. DPMPTSP Kota Magelang juga bersinergi untuk pencapaian tujuan lain seperti Kesetaraan Gender. Dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan DPMPTSP juga menyusun GBS (Gender Budget Statement) dan GAP (Gender Analysis Pathway) dan dalam menjalankan tugas pokok fungsi pelayanan kepada masyarakat juga berspektif gender. Antara lain menyediakan ruang laktasi, menyediakan fasilitas untuk disable, ruang bermain anak dan menyediakan layanan prioritas.
7. Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan bertujuan untuk terjadi perubahan yang sistematis dan konsisten agar pola pikir dan budaya kerja

individu atau unit kerja menjadi lebih baik. Salah satu area yang menjadi fokus reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk dalam komponen pengungkit pada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk dalam komponen hasilnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan Magelang Kota Cerdas dapat berperan sebagai pendorong dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi percepatan layanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksana. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui implementasi sistem merit secara menyeluruh. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan manajemen SDM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus terwujud reformasi birokrasi untuk Kota Magelang yang lebih baik.

8. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. WHO (World Health Organization) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Kota Magelang menetapkan kondispi ini sebagai kejadian luar biasa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 360.2/70/112 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana wabah

Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kota Magelang. Berbagai sektor mengalami tekanan termasuk di DPMPTSP Kota Magelang dimana perlu dilakukan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan protokol kesehatan dan perbaikan standar operasional prosedur; Peningkatan akses terhadap jaringan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelayanan secara online tanpa tatap muka.

9. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Isu global juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari kajian kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional antara lain terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean yaitu terkait pengembangan investasi yang fokus pada :

- Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum;
- Kemudahan berusaha;
- Perluasan investasi;
- Database investasi; dan
- Perluasan investasi perusahaan nasional di kawasan ASEAN.

Berlakunya MEA memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan sarana prasarana kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan daya saing hasil produk Kota Magelang agar mampu bersaing secara global.

10. Kemudahan Berbisnis Pemerintah pusat tengah gencar dalam meningkatkan posisi/ peringkat Indonesia dalam hal Ease of Doing Business (EoDB [Kemudahan berbisnis). Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 189 negara yang disurvei. Survei terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei. Target yang akan dicapai adalah peringkat 40. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi dalam rangka menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, dan mengupayakan bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut dapat terlaksana sampai pada level terendah di daerah. Kemudahan berusaha menjadi bagian penting dari langkah pemerintah untuk menaikkan posisi Indonesia peringkat kemudahan berbisnis antara lain berupa kebijakan

pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang berisi pemangkasan sejumlah izin, prosedur, waktu dan biaya.

11. Daya saing ekonomi dan Iklim Investasi Daya saing merupakan kemampuan untuk dapat memiliki daya tarik sehingga akan memiliki nilai lebih tersendiri di dalam suatu persaingan. Daya saing daerah menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Terdapat 3 (tiga) komponen yang sangat berpengaruh :

- a. Kondusifitas wilayah berpengaruh pada keberanian investor untuk berinvestasi dengan memperhatikan dinamika angka kriminalitas beserta faktor pendukung lain yang menjamin kenyamanan berinvestasi. Di Kota Magelang, terus dilakukan upaya untuk menekan angka kriminalitas, serta didukung dengan peningkatan kualitas iman taqwa, dan religiusitas masyarakat
- b. Keunggulan Komparatif lebih mengarah kepada bagaimana suatu daerah memanfaatkan keunggulan yang dimiliki di berbagai sektor untuk bersaing dengan daerah sekitar. Termasuk dalam hal ini keunggulan produk UMKM yang terus dilakukan pembinaan pada peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM sehingga menjadi lebih berani berinovasi terhadap produknya.
- c. Keunggulan kompetitif dengan indikator:
 - 1) makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja. Untuk mengatasi bonus demografi maka perlu dibukanya peluang kerja sebesar-besarnya.
 - 2) kualitas infrastruktur, yang dalam hal ini, infrastruktur Kota Magelang sudah terjaga untuk selalu dalam kondisi baik.
 - 3) kesehatan dan pendidikan dasar, yang tercermin dengan nilai IPM yang meskipun semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap diupayakan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanannya dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pusat pelayanan yang modern dan terintegrasi harus menjadi budaya penyelenggara. Dimana akan tergabung OPD dan instansi vertical dalam memberikan pelayanan publik terintegrasi di satu tempat/bangunan. Masyarakat bisa mengurus KTP, SIM, Paspor dan membayar di satu tempat. Bangunan MPP harus memenuhi syarat bisa melayani masyarakat berkebutuhan khusus, ramah untuk ibu dan anak serta berada di lokasi strategis.
- b. Regulasi Baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap kebijakan dan mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian perizinan dan non perizinan (Risk Based Approach) dan penyesuaian kelembagaan DPMPTSP dimana akan dilaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
- c. Implementasi OSS versi RBA sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengajuan izin usaha . Bagaimana mensosialisasikan dan membudayakan masyarakat untuk berperan secara aktif dan mandiri dalam pengajuan izin melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi dan menekankan pada porsi fungsi pengawasan terintegrasi yang lebih besar.
- d. Dari capaian kegiatan investasi di Kota Magelang 5 tahun terakhir, masih banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih terkendala. Belum optimalnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang dan banyak izin usaha yang belum efektif berakibat belum optimalnya realisasi investasi di Kota Magelang dari hasil pemantauan LKPM.

- e. WBK Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian/ Lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- f. Kemudahan Berbisnis Pemerintah pusat tengah gencar dalam meningkatkan posisi/ peringkat Indonesia dalam hal Ease of Doing Business (EoDB [Kemudahan berbisnis). Survey terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei. Target yang akan dicapai adalah peringkat 40. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi dalam rangka menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, dan mengupayakan bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut dapat terlaksana sampai pada level terendah di daerah. Reformasi Birokrasi. Isu global juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari kajian kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional antara lain p[erbaikan] Pemberantasan Korupsi. Dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan DPMPTSP juga menyusun GBS (Gender Budget Statement) dan GAP (Gender Analysis Pathway) dan dalam menjalankan tugas pokok fungsi pelayanan kepada masyarakat juga berspektif gender. Antara lain menyediakan ruang laktasi, menyediakan fasilitas untuk disable, ruang bermain anak dan menyediakan layanan prioritas

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 adalah :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Magelang.

Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah:

MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran Berlandaskan IMTAQ
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

5. Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Misi ke-3 dan misi ke-4 yaitu:

- ☒ Misi ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
- ☒ Misi ke-4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebanyak tiga tujuan dan tiga sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan		IKM Pelayanan Perizinan	77	83.5	83.5	84	84.5	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	5	4.5	4	3.5	3	2.5
	Meningkatnya investasi		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	15%	16%	16%	16%	16%	16%
		Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	-	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD		Hasil Penilaian SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	68.72	70	71	72	73	74

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	1.1. IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	Hasil Perhitungan dari 9 Unsur Sesuai Juknis dari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tahun n	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	1.2	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	Waktu Pelayanan Perizinan adalah ukuran waktu yang telah digunakan oleh pemohon izin dalam pengajuan suatu permohonan izin/layanan perizinan dan non perizinan dimulai dari berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan	Jumlah waktu pelayanan perizinan tahun n/ Jumlah izin tahun n	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2	Meningkatnya investasi	2.1	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Prosentase	Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri	$\frac{\text{Nilai Investasi PMA/PMDN tahun } n - \text{Nilai Investasi PMA/PMDN tahun } (n-1)}{\text{Nilai Investasi PMA/PMDN tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	2.2	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Perusahaan	Investor berskala nasional adalah investor yang memiliki usaha di	Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN tahun n	Bidang Penanaman Modal

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					lebih dari satu daerah/kab/kota Target investor berskala nasional periode 2022 - 2026 : 3 investor / th		
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	3.1	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai Sakip	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil review dari Inspektorat	Nilai SAKIP tahun n	Sekretariat
	Meningkatnya Nilai AKIP	3.2	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Hasil review dari Inspektorat	Nilai SAKIP tahun n	Sekretariat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	1.1.		IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	83.5
		1.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	4.5
	Meningkatnya investasi	2.1		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Prosentase	16%
		2.2	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Perusahaan	3
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	3.1		Hasil Penilaian SAKIP	Nilai Sakip	BB
		3.2	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	70

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 11 bulan januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	83.5
	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	4.5
3	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Prosentase	16%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Perusahaan	3
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai Sakip	BB
	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	70

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	100%	495.916.000,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	100%	9.947.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	20%	485.969.000,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	22.629.000,00
	Penyelenggaraan Promosi	Persentase peningkatan	10%	22.629.000,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kepeminatan (LOI)		
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan	15%	427.569.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	50%	427.569.000,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	93,5%	474.464.000,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	80%	474.464.000,00
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10%	50.889.000,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	80%	50.889.000,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100%	5.672.024.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen	61.826.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi Keuangan PD	15 Dokumen	4.697.962.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi Umum OPD	7 Kegiatan	99.088.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan	682.741.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	4 Jenis	127.122.000,00
	Penataan Organisasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen	3.285.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada tanggal 4 bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	83.5
	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	4.5
3	Meningkatnya Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Prosentase	16%
	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Perusahaan	3
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai Sakip	BB
	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	70

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	100%	495.916.000,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	100%	9.947.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	20%	485.969.000,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	239.295.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	10%	239.295.000,00
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan	15%	439.681.692,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	50%	439.681.692,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	93,5%	1.239.024.816,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	80%	1.239.024.816,00
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10%	142.882.00,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	80%	142.882.00,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100%	4.961.187.950,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen	73.826.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi Keuangan PD	15 Dokumen	3.803.677.326,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi Umum OPD	7 Kegiatan	138.451.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan	777.734.624,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	4 Jenis	164.214.000,00
	Penataan Organisasi	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen	3.285.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≥ 100
2	Tinggi	76 ≥ 90
3	Sedang	66 ≥ 75
4	Rendah	51 ≥ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini

didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	83.5	95.41	114,26%	Sangat Tinggi	Bid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	4.5	2.74	139,11%	Sangat Tinggi	Bid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	16%	41.15%	257.18%	Sangat Tinggi	Bid. Penanaman Modal
4	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	3	16	533,33%	Sangat Tinggi	Bid. Penanaman Modal
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB	BB	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat
6	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	70	79.55	113.64%	Sangat Tinggi	Sekretariat

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022

Hasil capaian kinerja pada tahun 2022 dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kondusifitas iklim investasi dan daya saing investasi, dan dapat kita lihat bahwa seluruh indikator masuk dalam kategori sangat baik karena nilai capaian kinerja dari seluruh indikator berada diatas 100% antara lain :

1. Indikator IKM Pelayanan Perizinan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat didapat dari kegiatan Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Magelang. Untuk memperoleh saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dilaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis online, yang selain bisa diisi secara langsung melalui website atau di ruang pelayanan MPP, juga link untuk mengisi survey dikirimkan

melalui pesan singkat kepada masyarakat penerima layanan. Untuk nilai SKM di bulan Desember tahun 2022 95,41 nilai tersebut masih diatas target yang ditetapkan yaitu 83.5. Nilai tersebut diperoleh dari 108 responden pada bulan Desember 2022, sedangkan jumlah responden secara keseluruhan pada tahun 2022 adalah 1078 responden. Tercapainya indikator IKM Pelayanan Perizinan ini antara lain karena sudah terselenggaranya MPP dimana seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dan dinas teknis terkait sudah melaksanakan pelayanan di satu tempat yang memberikan kemudahan dan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat. Selain itu layanan perizinan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat juga disediakan dan pada akhir tahun 2022 kembali dilakukan penambahan layanan antara lain UKPBJ, Pengadilan Negeri, pengadilan Agama dan Kejaksaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, PT. Taspen Persero, PLN dan PT. Pos Indonesia.

2. Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan

Waktu Pelayanan Perizinan adalah ukuran waktu yang digunakan oleh pemohon izin dalam pengajuan suatu permohonan izin/layanan perizinan dan non perizinan dimulai dari berkas diterima sampai dengan ijin diterbitkan. Indikator Kinerja rata-rata lama waktu pelayanan perizinan pada tahun 2022 mencapai 2.74 hari dari target 4.5 hari yang telah ditetapkan. Lama waktu pelayanan perizinan tersebut dihitung dari 44 izin yang dilayani menggunakan aplikasi sicanik dari 72 izin yang dilayani di DPMPTSP dengan jumlah izin terbit 2678.

3. Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN

Indikator Kinerja pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN pada tahun 2022 mencapai 41.15% dari target 16% yang telah ditetapkan. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai investasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 583.436.000.000 yang terdiri dari PMA 10.152.000.000 dan PMDN

573.284.000.000. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi investasi PMA/PMDN sebesar 823.515.425.921,- yang terdiri dari PMA 50.906.157.790 dan PMDN 772.609.268.131. Nilai investasi tersebut dari 3877 Perusahaan PMDN dan 2 Perusahaan PMA dengan penambahan nilai realisasi investasi terbesar berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Laporan LKPM dilaksanakan melalui aplikasi OSS sehingga satu sistem aplikasi ini digunakan dari proses perizinan hingga pelaporan LKPM yang diharapkan akan semakin memudahkan pengusaha dalam proses perizinan sampai pelaporan realisasi penanaman modal yang dilaksanakan.

4. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)

Indikator jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) sejumlah 16 perusahaan yang jauh melampaui target indikator kinerja yang ada di angka 3 investor berskala nasional (PMA/PMDN). Peningkatan jumlah investor baru ini karena dilakukannya peningkatan daya saing dan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi regulasi terkait penanaman modal, juga pemberian fasilitasi/kemudahan penanaman modal maupun penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang clean dan clear serta menarik bagi investor. Pelaksanaan promosi penanaman modal juga merupakan faktor yang mendukung dalam penambahan jumlah investor berskala nasional dan pada tahun 2022 terdapat 6 kepeminatan investasi yaitu : PT. Agra Megah Internasional , PT Eka Bogainti, Era Elektronik Magelang, Food Beverages Indonesia, PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, PT. Home Center Retail Indonesia.

5. Hasil Penilaian SAKIP dan Nilai SAKIP

Evaluasi penilaian Hasil penilaian SAKIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai 79.55 dengan predikat BB sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk memperoleh predikat BB, namun dilihat dari nilai yang

diperoleh mengalami peningkatan yang cukup baik dari nilai 72.54 menjadi 79.55. Hal tersebut dapat terwujud karena peran serta seluruh bagian untuk meningkatkan kualitas sampai dengan implementasi dari perencanaan yang telah disusun sampai dengan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Penilaian SAKIP ini dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	77	79.40	103.1%	83.5	95.41	114,26%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	5	3.08	138%	4,5	2.74	139%
3	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	15 %	25.77% dan 436.43%	231.1%	16%	41.15%	258.56%
4	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	-	-	-	3	16	533,33%
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	-	BB	100%	BB	BB	100%
6	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	-	72.54	100%	70	79.55	113.64%

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2021-2022

Dari data capaian indikator yang dapat kita lihat pada semua indikator mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, Pelaksanaan pelayanan perizinan untuk indikator nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Nilai SKM pada tahun 2021 sebesar 79,40 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 95,41 hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah responden karena pada tahun 2021 jumlah responden 402 sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 1078 responden. Selain itu kepuasan masyarakat juga didukung oleh lama proses pelayanan perizinan dimana pada tahun 2022 rata-rata lama waktu pelayanan perizinan sudah lebih cepat yaitu 2.74 hari dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 4,5 hari maupun dengan realisasi pada tahun 2021 selama 3.08 hari. Hal tersebut karena ada penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan serta komitmen dari petugas yang terkait pada proses perizinan dan nonperizinan baik internal maupun eksternal pada Dinas teknis terkait. Sedangkan untuk pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan 41.15% dengan capaian kinerja 257.18% dengan nilai investasi 823.515.425.921 dibandingkan tahun 2021 yang memiliki capaian kinerja 231.1% dengan nilai investasi 583.436.000.000. Untuk Jumlah investor juga mencapai 533,33% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sejumlah 3 investor nasional PMA dan PMDN, sedangkan untuk tahun 2021 untuk penambahan investor nasional PMA dan PMDN belum dihitung. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dengan nilai 79.55 dibandingkan nilai SAKIP 2021 yaitu 74.54 namun masih memiliki predikat yaitu BB.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	95.41	85	112.25%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	2.74	2.5	90.4%
3	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	41.15%	80%	51.71%
4	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	16	15	106.67
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB	BB	100%
6	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	79.55	74	107.5%

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022

Pada capaian awal renstra 2021 sampai dengan 2026 memiliki capaian yang sangat tinggi karena pada semua indikator di tahun 2022 memiliki nilai lebih dari 20% bahkan ada yang lebih dari 100% dibandingkan dengan capaian akhir renstra seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional terkait pertumbuhan investasi di daerah yaitu untuk standar nasional sebesar 33.33% maka capaian pada tahun 2022 sudah melebihi standar nasional dengan nilai sebesar 41.15% dan capaian sebesar 123.46% dari target nasional yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	41.37%	33.33%	123.46%

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022

Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	83.5	95.41	114,26%	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Jumlah responden yang meningkat ☑ Sistem IKM Online yang memudahkan masyarakat ☑ Petugas menghimbau penerima layanan untuk mengisi SKM 	Secara konsisten mengarahkan penerima layanan untuk mengisi SKM untuk memberikan feedback terhadap pelayanan yang telah diterima
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	4,5	2.74	125%	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Petugas pelayanan sudah melaksanakan tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan pada SOP Perizinan dan Non Perizinan ☑ Masih ada lama waktu pelayanan yang melebihi SOP Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Penyesuaian SOP Perizinan dan Non Perizinan pada alur proses perizinan ☑ Dilaksanakan monev terhadap petugas internal maupun eksternal pada dinas teknis
3	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	16%	41.15%	257.18%	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan yang berjalan efektif ☑ Pelaksanaan pendampingan kepada pelaku Usaha secara optimal ☑ Tersedianya sistem OSS terintegrasinya yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan pendampingan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan PM secara kontinu - Fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal - Pengawasan Penanaman Modal

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							bersama Perangkat Daerah terkait
4	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	3	16	533,33%	<input checked="" type="checkbox"/> Tersedianya sistem perizinan OSS yang terintegrasi dengan dinas teknis yang efektif untuk mengetahui perizinan yang mengalami kendala <input checked="" type="checkbox"/> Tersedianya regulasi pemberian insentif/kemudahan penanaman modal <input checked="" type="checkbox"/> Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan kepada pelaku usaha untuk kelancaran proses perizinan <input checked="" type="checkbox"/> Sosialisasi regulasi pemberian insentif/kemudahan penanaman modal <input checked="" type="checkbox"/> Evaluasi dan Monitoring atas Insentif dan Kemudahan PM
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB	BB	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Penyusunan dokumen perencanaan melibatkan seluruh unsur dari kepala dinas hingga pelaksana pada organisasi <input checked="" type="checkbox"/> Laporan kinerja belum dimanfaatkan oleh seluruh pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyesuaian pohon kinerja yang lebih berkualitas - Menyusun SOP pengumpulan capaian kinerja yang disosialisasikan kepada seluruh pegawai
6	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	70	79.55	113.64%		

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022

Keberhasilan realisasi indikator kinerja sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur kinerja pelayanan salah satunya menggunakan survey kepuasan masyarakat. Pada DPMPTSP sudah menyediakan sistem IKM secara online yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menilai pelayanan yang sudah diterima maupun memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Dengan adanya sistem IKM secara online maka jumlah responden yang berpartisipasi dalam memberikan penilaian menjadi semakin banyak sehingga penilaian akan lebih obyektif. Untuk mempertahankan nilai SKM yang baik maka diperlukan

upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan maupun sarana prasarana pendukungnya. Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) juga mendorong kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat karena layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagian besar sudah dapat diakses di satu tempat sehingga memberikan kemudahan serta menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

2. Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan

Pelaksanaan pelayanan perizinan telah diatur dalam Standar Operasioanl Prosedur Perizinan dan Nonperizinan dimana didalamnya terdapat lama waktu pelayanan perizinan. Pada indikator rata-rata lama waktu pelayanan perizinan memiliki ketercapaian yang sangat baik karena adanya penyesuaian alur proses pelayanan perizinan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan dan telah ditetapkan pada 22 juli 2022 dengan nomor 510.4/718/330 tahun 2022. Selain itu komitmen dari petugas pelayanan perizinan baik internal maupun eksternal pada Dinas teknis terkait juga terus dimonitoring dan dievaluasi sehingga dapat mematuhi lama waktu pelayanan perizinan sesuai dengan SOP perizinan dan Nonperizinan.

3. Indikator Pertumbuhan Nilai investasi PMA dan PMDN

Pada indikator ini memiliki ketercapaian yang sangat tinggi, hal tersebut karena kegiatan-kegiatan pemantaun dan pengawasan maupun pembinaan yang dilakukan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha untuk dapat melaksanakan LKPM yang merupakan alat untuk menghitung nilai realisasi investasi di suatu daerah. Selain itu juga kebijakan dari pemerintah terkait penggunaan sistem OSS juga bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memproses perizinan hingga melaksanakan LKPM. Walaupun keberhasilan indikator ini sudah sangat baik namun tetap perlu dilakukan pendampingan secara terus menerus kepada para pelaku usaha agar kemudahan dalam proses perizinan maupun LKPM dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha.

4. Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)

Peningkatan jumlah investor baru selaras dengan kenaikan nilai realisasi investasi karena dengan semakin bertambahnya jumlah investor tentunya nilai investasi juga akan meningkat. Hal tersebut didukung dengan sistem OSS yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan berusahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pendampingan kepada masyarakat dalam menggunakan sistem OSS tersebut. Harmonisasi regulasi terkait penanaman modal juga dilaksanakan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal dengan disusunnya 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Penanaman Modal dan Peratuarn Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 3 (tiga) Peratuan Walikota yaitu Peraturan Walikota Promosi dan Pengembangan Iklim, Peraturan Walikota Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dan Peraturan Walikota Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, juga pemberian fasilitasi/kemudahan penanaman modal maupun pemetaan potensi investasi melalui penyusunan kajian potensi dan peluang investasi yang clean dan clear untuk menarik minat investor. Selain itu realisasi kepeminatan investasi juga akan menambah capaian jumlah investor baru dimana pada tahun 2022 terdapat 6 Letter Of Intent (LOI) dan sudah terealisasi sebanyak 4 LOI.

5. Hasil Penilaian SAKIP dan Nilai SAKIP

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh Inspektorat untuk menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi SAKIP mengalami kenaikan nilai SAKIP walaupun predikat masih sama yaitu dengan predikat BB. Peningkatan tersebut merupakan upaya seluruh pihak untuk menyusun dokumen perencanaan serta melakukan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu evaluasi capaian kinerja juga dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi dasar dalam mencapai kinerja berikutnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	IKM Pelayanan Perizinan	114,26%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	88,38%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	125%		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	2191,3%	
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektroni	106,25%	
3	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	257,18%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan	163,07%	Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	256,26%	

4	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	533,33%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor PMA/PMDN	220.83%	Menunjang
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	100%	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	100%	
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	200%	
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100%	Menunjang
6	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	113.64%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	100%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	100%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi Umum OPD	100%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	100%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100%	
				Penataan Organisasi	Tersusunnya laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	100%	

Sumber : Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang periode 2022

Program pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi pembuatan kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/kemudahan penanaman modal akan mendorong peningkatan jumlah investasi baru maupun memanfaatkan Central Java Investment Platform (CJIP) yang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan upload profil potensi/peluang investasi tersebut di aplikasi CJIP yang dapat diakses oleh publik secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk review Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota pada tahun 2022 antara lain Peraturan Daerah Penanaman Modal, Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Peraturan Walikota Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Peraturan Walikota Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dan Peraturan Walikota Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Program promosi penanaman modal juga mendorong pencapaian indikator kinerja peningkatan jumlah investasi baru skala nasional karena dengan adanya kegiatan promosi akan menghasilkan Letter Of Intent (LOI) dari investor yang akan dilakukan proses lebih lanjut sehingga dapat terealisasi dan menambah jumlah investor baru yang berinvestasi di Kota Magelang. Untuk LOI pada tahun 2022 mengalami peningkatan 200% karena dari 2 LOI pada tahun 2021 bertambah menjadi 6 LOI pada tahun 2022 yang terdiri dari PT. Agra Megah Internasional, PT Eka Bogainti, Era Elektronik Magelang, Food Beverages Indonesia, PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk, PT. Home Center Retail Indonesia. Untuk pertumbuhan nilai investasi baik PMA maupun PMDN didukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang meliputi berbagai macam kegiatan antara lain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan pelaporan LKPM, fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal, pemantauan dan pengawasan penanaman modal dimana semua kegiatan tersebut dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat mencatatkan realisasi investasinya. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diukur dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat, dan rata-rata lama waktu pelayanan perizinan didukung oleh program pelayanan penanaman modal yang meliputi kegiatan

pelayanan perizinan dan non perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen maupun penanganan pengaduan yang seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses perizinannya. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal juga mendukung indikator nilai survey kepuasan masyarakat, dan rata-rata lama waktu pelayanan perizinan tetapi memiliki fungsi yang lebih luas terkait penyediaan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dari sisi sistem informasi maupun sarana pendukung baik jaringan internet, pemeliharaan sarana prasarana maupun helpdesk terkait penggunaan sistem maupun kendala dari sisi hardware maupun software. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal sampai dengan publikasi data dan informasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada program ini.

B. Realisasi Anggaran

Kebijakan anggaran belanja yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kota Magelang yaitu belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh pagu anggaran awal tahun pada belanja langsung sebesar Rp. 2.447.797.000,- dan mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun anggaran menjadi sebesar Rp. 3.719.538.132,- (naik sebesar Rp. 1.271.741.132,-). Porsi kenaikan anggaran tersebut disebabkan karena

adanya penambahan tenant pada Mall Pelayanan Publik (MPP) sejumlah 4 (empat) tenant untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh UKPBJ, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang terpadu disatu tempat yang akan memberikan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain penambahan tenan juga adanya pengadaan sarana prasara SIM online untuk mewujudkan pelayanan SIM di MPP yang selama ini belum terlaksana karena belum tersedianya sarana prasaran pendukung dalam pelaksanaan pelayanan SIM. Untuk kegiatan promosi penanaman modal dengan membuat gerai investasi yang merupakan layanan/tempat fasilitasi untuk investor beserta sistem informasi potensi peluang investasi (SI PPOINT) sehingga dapat memberikan ruang yang nyaman bagi calon investor untuk melakukan pendalaman/ mendapatkan informasi terhadap potensi dan peluang investasi yang ditawarkan serta mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait potensi dan peluang investasi yang disajikan pada sistem informasi peta potensi peluang investasi. Selain itu juga dilaksanakan promosi investasi melalui pameran investasi untuk lebih mendekat kepada masyarakat maupun pelaku usaha dengan mempromosikan potensi dan peluang investasi serta produk UMKM dan pariwisata secara langsung di Cihampelas Walk Mall Bandung sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Magelang. Untuk melengkapi pengelolaan data dan informasi penanaman modal juga membuat sistem informasi Geographic Information System (GIS) yang akan memberikan informasi terkait penanaman modal antara lain keberadaan reklame yang sudah berizin, lokasi potensi/peluang investasi, perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang dan ditampilkan menurut titik koordinat dan dapat diakses oleh masyarakat. Penambahan anggaran juga ada pada kegiatan rutin untuk pemenuhan kebutuhan rutin kantor seperti penambahan pada anggaran pemeliharaan kendaraan

jabatan, perjalanan dinas, kunjungan tamu, cetakan dan penggandaan, surat menyurat, jasa komunikasi listrik dan air untuk mengantisipasi kenaikan tarif dasar listrik, maupun pemeliharaan kamar mandi pengunjung maupun karyawan di MPP untuk meningkatkan fasilitas yang disediakan di MPP. Pada kegiatan perencanaan juga terdapat penambahan anggaran pendampingan penyusunan dokumen perencanaan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja berupa bimbingan teknis perencanaan, dan pada anggaran keuangan terdapat penambahan untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja keuangan. Selain penambahan anggaran pada beberapa kegiatan, terdapat pula kegiatan yang pagu anggarannya disesuaikan yaitu pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan logistik karena menyesuaikan dengan pagu yang dibutuhkan. Rincian anggaran pada masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Anggaran Tahun 2021

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN
(1)		(2)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.238.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.089.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.315.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.416.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.279.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.489.000
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.798.449.326
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	430.000

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN
(1)		(2)
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.400.000
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	398.000
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.796.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.951.000
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.938.000
14	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	1.440.000
15	Penyediaan Bahan/Material	26.086.000
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.650.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.590.000
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514.590.000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.544.624
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.624.000
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.039.000
23	Pemeliharaan Mebel	500.000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.069.000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.982.000
26	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3.285.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.947.000
2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	392.835.000
3	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	93.134.000
Program Promosi Penanaman Modal		
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.629.000

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN
(1)		(2)
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	216.666.000
Program Pelayanan Penanaman Modal		
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.099.981.608
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	126.150.208
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.713.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	11.180.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	36.297.692
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	337.752.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.632.000
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	142.882.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	495.916.000	494.364.005	99,69%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.947.000	9.934.000	99,87%
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.947.000	9.934.000	99,87%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	485.969.000	484.430.005	99,68%
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	392.835.000	391.317.005	99,61%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	93.134.000	93.113.000	99,98%
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	239.295.000	237.749.378	99,35%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	239.295.000	237.749.378	99,35%
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.629.000	22.627.750	99,99%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	216.666.000	215.121.628	99,29%
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.239.024.816	1.221.376.023	98,58%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.239.024.816	1.221.376.023	98,58%
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.099.981.608	1.082.705.597	98,43%
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	126.150.208	125.813.426	99,73%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.713.000	1.680.000	98,07%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	439.681.692	389.772.799	88,65%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	439.681.692	389.772.799	88,65%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	36.297.692	36.205.557	99,75%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	337.752.000	302.689.142	89,62%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.632.000	50.878.100	77,52%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	142.882.000	141.000.250	98,68%
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142.882.000	141.000.250	98,68%
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	142.882.000	141.000.250	98,68%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KAB/KOTA	4.961.187.950	4.738.257.897	95,51%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.826.000	69.149.684	93,67%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.238.000	61.633.684	93,05%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	1.089.000	1.083.000	99,45%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	1.315.000	1.308.000	99,47%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1.416.000	1.393.000	98,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	1.279.000	1.261.000	98,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.489.000	2.471.000	99,28%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.803.677.326	3.665.918.589	96,38%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.798.449.326	3.660.775.589	96,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	430.000	426.000	99,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.400.000	4.319.000	98,16%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	398.000	398.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.451.000	137.716.350	99,47%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.796.000	1.787.500	99,53%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.951.000	20.763.000	99,10%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.938.000	8.927.500	99,88%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	1.440.000	1.440.000	100,00%
	Penyediaan Bahan/Material	26.086.000	26.082.000	99,98%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.650.000	3.645.500	99,88%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.590.000	75.070.850	99,31%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	777.734.624	700.987.626	90,13%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	593.100	98,85%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514.590.000	437.992.389	85,11%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.544.624	262.402.137	99,95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	164.214.000	161.232.648	98,18%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.624.000	81.366.348	98,48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.039.000	43.574.200	96,75%
	Pemeliharaan Mebel	500.000	500.000	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.069.000	15.892.100	98,90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.982.000	19.900.000	99,59%
	Penataan Organisasi	3.285.000	3.253.000	99,03%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3.285.000	3.253.000	99,03%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan	83.5	95.41	114,26%	1.239.024.816	1.221.376.023	98,58%	1.21
	Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	4,5	2.74	125%				
	Meningkatnya investasi	16%	41.15%	257.18%	1.317.774.692	1.262.886.432	95.83%	4.12
	Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	3	16	533,33%				
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100%	4.961.187.950	4.738.257.897	95,51%	1.04
	Meningkatnya Nilai AKIP	70	79.55	113.64%	4.961.187.950	4.738.257.897	95,51%	1.18

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

Tingkat Efisiensi dari pencapaian kinerja dibandingkan dengan anggaran memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi karena rata-rata diangka lebih dari 1 bahkan pada indikator tujuan dengan indikator pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN maupun indikator sasaran dengan indikator jumlah investor skala nasional PMA/PMDN memiliki tingkat efisiensi sebesar 4.12.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	220.83%	220.83%	495.916.000	494.364.005	99,69%	2.21
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	9.947.000	9.934.000	99,87%	1
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20%	20%	100%	485.969.000	484.430.005	99,68%	1
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100%	239.295.000	237.749.378	99,35%	1
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10%	300%	3000%	239.295.000	237.749.378	99,35%	30.2
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	93.5%	82.64%	88.36%	1.239.024.816	1.221.376.023	98,58%	0.89
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	80%	94.66%	118.32%	1.239.024.816	1.221.376.023	98,58%	1.20
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	15%	24.46%	163.07%	439.681.692	389.772.799	88.65%	1.84
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50%	128.13%	256.26%	439.681.692	389.772.799	88.65%	2.89
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	10%	219.13%	2191.3%	142.882.000	141.000.250	98,68%	22.2
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80%	85%	106.25%	142.882.000	141.000.250	98,68%	1.07
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KAB/KOTA	100%	100%	100%	4.961.187.950	4.738.257.897	95,51%	1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	100%	73.826.000	69.149.684	93,67%	1

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15	15	100%	3.803.677.326	3.665.918.589	96,38%	1
Terlaksananya tertib administrasi Umum OPD	7	7	100%	138.451.000	137.716.350	99,47%	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100%	777.734.624	700.987.626	90,13%	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	100%	164.214.000	161.232.648	98,18%	1
Penataan Organisasi	1	1	100%	3.285.000	3.253.000	99,03%	1

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

Tingkat efisiensi pada level program dapat dilihat bahwa disemua program pencapaian indikator efisien dan selaras dengan penggunaan anggaran. Hal tersebut dapat dilihat hampir semua program memiliki tingkat efisiensi dengan nilai 1 bahkan ada sampai 30. Sedangkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan tingkat efisiensi sebesar 22.2 dan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 30.2 . Sedangkan untuk tingkat efisiensi yang ada dibawah 1 hanya satu program yaitu program program pelayanan penanaman modal dengan tingkat efisiensi 0.89.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❑ Tujuan terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan memiliki capaian kinerja sebesar 114.26% dengan kategori sangat tinggi dan untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja 125% .
- ❑ Tujuan meningkatnya investasi memiliki capaian kinerja 257.18% dengan kategori sangat tinggi dan untuk sasaran meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja dengan capaian kinerja sebesar 533.33% dengan

kategori sangat tinggi.

- Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD memiliki capaian kinerja dengan 100% kategori sangat tinggi dan untuk sasaran Meningkatnya Nilai AKIP dengan capaian kinerja sebesar 113.64% dengan kategori sangat tinggi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.517.987.458 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.222.520.352, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 96.07% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 215.95%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang.

Kota Magelang, 25 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
SEKRETARIS DPRDP KOTA MAGELANG



INDAH DWIANTARI, S. Sos

NIP. 19720429 199703 2 002

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUCHAMAD ABDUL AZIS**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUCHAMAD NUR AZIZ**
Jabatan : **WALIKOTA MAGELANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2022

Pihak Kedua,


MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama,

MUCHAMAD ABDUL AZIS

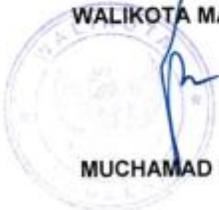
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

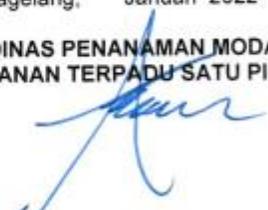
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	83.5
		Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	hari	4.5
2.	Meningkatnya Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	16%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor	3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai Sakip	BB
		Nilai SAKIP	Nilai Sakip	73

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 495.916.000	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 22.629.000	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 474.464.000	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 427.569.000	APBD dan DAK
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 50.889.000	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.672.024.000	APBD

Magelang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ


MUCHAMAD ABDUL AZIS



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDAH DWI ANTARI**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MUCHAMAD NUR AZIZ**
Jabatan : **WALIKOTA MAGELANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2022



Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Pihak Pertama,

INDAH DWI ANTARI

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	16
3	Meningkatnya Jumlah Investor	Prosentase Pertumbuhan Investor PMA/PMDN	%	10
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai Sakip	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 495.916.000	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 239.295.000	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.239.024.816	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 439.681.692	APBD dan DAK
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 142.882.000	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.961.187.950	APBD

Magelang, November 2022



**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS DPRD
KOTA MAGELANG**

INDAH DWI ANTARI



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran No. 7 Telp (0293) 314663 Fax (0293) 361775
MAGELANG
56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
NOMOR 050 / 006 / 330 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup perangkat daerah, perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penerapan dan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja dan menyusun pelaporan kinerja perangkat daerah
 - c. Melaksanakan evaluasi internal terhadap akuntailitas perangkat daerah
 - d. Melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi atas penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi SAKIP Tahun 2021.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point a. dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690724 199803 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MAGELANG

NOMOR 050/ /330/TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	KETUA
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	SEKRETARIS
3.	Koordinator Penanaman Modal	ANGGOTA
4.	Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	ANGGOTA
5.	Sub Koordinator Program	ANGGOTA
6.	Pranata komputer	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 199803 1 006

MATIKS RENSTRA

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2021	Targ et	Pagu Indikatorif	Targ et	Pagu Indikatorif	Targ et								
Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan					IKM Pelayanan Perizinan	indeks	83,41	83,5		83,5		84		84,5		85		85		DPMPTS P	DPMP TSP
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan				Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan dengan survey	hari	5	4,5		4		3,5		3		2,5		2,5		DPMPTS P	DPMP TSP
					Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan tanpa survey	hari	2	2		2		2		2		2		2		DPMPTS P	DPMP TSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal			Persentase Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	%	90	93,5	513.205.000	94	801.171.000	94,5	896.437.000	95	966.017.000	95,5	1.004.520.000	95,5		DPMPTS P	DPMP TSP

76

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2021	Targ et	Pagu Indikatorif	Targ et	Pagu Indikatorif	Targ et								
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang dilayani	%	78	80	513.205.000	85	801.171.000	80	896.437.000	93	966.017.000	100	1.004.520.000	100		DPMPTS P	DPMP TSP
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan yang dilayani secara elektronik	izin	1000	950	368.578.000	950	625.000.000	950	700.000.000	950	730.000.000	950	800.000.000	4750		DPMPTS P	DPMP TSP
			Pemenuhan komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemenuhan komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang dipantau pemenuhan komitmennya	izin	900	300	132.164.000	300	153.519.000	300	171.519.000	300	188.519.000	300	174.370.000	1500		DPMPTS P	DPMP TSP
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pemohon	10	30	2.167.000	30	11.326.000	30	12.459.000	30	13.794.000	30	15.073.000	150		DPMPTS P	DPMP TSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah penetapan fasilitas/insenti	perusahaan	0	2	10.296.000	2	11.326.000	2	12.459.000	2	13.704.000	2	15.073.000	10		DPMPTS P	DPMP TSP

77

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et			
				Daerah	1 daerah kepada perusahaan															
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, informasi dan Sistem Informasi PM	%	10	10	61.629.000	10	75.000.000	10	90.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	30	DPMPTS P	DPMP TSP
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pengelolaan data, informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	%	70	80	61.629.000	85	75.000.000	90	90.000.000	95	100.000.000	100	110.000.000	100	DPMPTS P	DPMP TSP
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah masyarakat yg mengunjungi media informasi dan memahami tata cara pengajuan izin	orang	2800	3000	61.629.000	3100	75.000.000	3200	90.000.000	3300	100.000.000	3400	110.000.000	16000	DPMPTS P	DPMP TSP
	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				Nilai SAKIP	Angka	68,72	70		71		72		73		74			DPMPTS P	DPMP TSP

78

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	%	100	100	5.635.142.000	100	6.196.856.200	100	6.818.521.320	100	7.500.374.002	100	8.120.411.402	100	DPMPTS P	DPMP TSP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	dokumen	9	8	12.906.000	8	14.196.600	8	15.816.260	8	17.177.886	8	18.895.675	8	DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	3	2	5.318.000	2	5.849.800	2	6.434.780	2	7.078.238	2	7.786.084	2	DPMPTS P	DPMP TSP
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1.089.000	1	1.197.900	1	1.317.690	1	1.449.459	1	1.594.405	1	DPMPTS P	DPMP TSP
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1.315.000	1	1.446.500	1	1.591.190	1	1.750.265	1	1.925.292	1	DPMPTS P	DPMP TSP
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	1.416.000	1	1.557.600	1	1.713.360	1	1.884.696	1	2.073.166	1	DPMPTS P	DPMP TSP
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	dokumen	1	1	1.279.000	1	1.406.900	1	1.547.590	1	1.702.349	1	1.872.584	1	DPMPTS P	DPMP TSP

79

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (KU)	Satuan Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et				Pagu Indikatif						
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et				Pagu Indikatif						
					SKPD yang disusun																
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	2	2	3.489.000	2	2.737.900	2	3.011.690	2	3.312.859	2	3.644.145	2		DPMPTS P	DPMP TSP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terzusunnya laporan administrasi keuangan OPD	Laporan	15	15	4.697.962.000	15	5.167.738.200	15	5.684.534.020	15	6.252.987.422	15	6.878.286.164	15		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	26	26	4.695.694.000	26	5.165.263.400	26	5.681.789.740	26	6.249.968.714	26	6.874.963.385	26		DPMPTS P	DPMP TSP
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	490.000	1	473.000	1	520.300	1	572.330	1	629.563	1		DPMPTS P	DPMP TSP
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD yang disusun	Laporan	13	13	1.440.000	13	1.584.000	13	1.742.400	13	1.916.640	13	2.108.304	13		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Laporan	1	1	398.000	1	437.800	1	481.580	1	529.738	1	582.712	1		DPMPTS P	DPMP TSP
			Administrasi Umum Perangkat		Terlaksananya terbit administrasi	kegiatan	7	7	109.926.000	7	120.918.600	7	133.010.460	7	146.311.306	7	160.942.637	7		DPMPTS P	DPMP TSP

80

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (KU)	Satuan Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et				Pagu Indikatif						
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et				Pagu Indikatif						
			Daerah		umum OPD																
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya	Ruangan	13	13	1.796.000	13	1.973.600	13	2.173.160	13	2.390.476	13	2.629.524	13		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN dan THL yang disediakan makan minumannya	orang	44	44	28.560.000	44	31.416.000	44	34.557.600	44	38.013.360	44	41.814.696	44		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak	Jenis	7	7	7.938.000	7	8.791.800	7	9.604.980	7	10.569.478	7	11.622.026	7		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2	2	1.440.000	2	1.584.000	2	1.742.400	2	1.916.640	2	2.108.304	2		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material pembersih kantor yang tersedia	Jenis	23	23	26.086.000	23	28.694.600	23	31.564.060	23	34.720.466	23	38.192.513	23		DPMPTS P	DPMP TSP
				Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kunjungan	10	10	2.700.000	10	2.970.000	10	3.267.000	10	3.593.700	10	3.953.070	10		DPMPTS P	DPMP TSP
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kegiatan	35	35	41.406.000	35	45.546.600	35	50.101.260	35	55.111.386	35	60.622.523	35		DPMPTS P	DPMP TSP

81

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basi sne	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penang gung Jawab	Lokasi			
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et			Pagu Indikatif	Targ et	R p.								
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Terpenuhi nya jasa penunjang kantor	kegiatan	3	3	682.741.0 00	3	751.015.1 00	3	826.116.6 10	3	908.728.2 71	3	999.601.0 88	3		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang dikirim	Surat	20	20	350.000	20	385.000	20	423.500	20	465.850	20	512.435	20		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Rekening	4	4	462.540.0 00	4	508.794.0 00	4	559.673.4 00	4	615.640.7 40	4	677.204.8 14	4		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjagannya	orang	17	17	219.851.0 00	17	241.836.1 00	17	266.019.7 10	17	292.621.6 81	17	321.883.8 49	17		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Jenis	4	4	128.322.0 00	4	141.154.2 00	4	155.269.6 20	4	170.796.5 82	4	187.876.2 40	4		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan jabatan dinas yang terpelihara	Kendaraan	18	18	69.914.00 0	18	76.905.40 0	18	84.595.94 0	18	93.055.53 4	18	102.361.0 87	18		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan		Jumlah kendaraan operasional lapangan dinas yang dipelihara	Kendaraan	5	5	46.239.00 0	5	50.862.90 0	5	55.949.19 0	5	61.544.10 9	5	67.688.52 0	5		DPMPTS P	DPMP TSP			

82

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basi sne	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penang gung Jawab	Lokasi			
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et			Pagu Indikatif	Targ et	R p.								
			Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel kantor yang dipelihara	Buah	5	5	500.000	5	550.000	5	605.000	5	665.500	5	732.050	5		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesinnya yang terpelihara	Unit	20	20	11.669.00 0	20	12.835.90 0	20	14.119.49 0	20	15.531.43 9	20	17.084.58 3	20		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Penataan Organisasi		Tersusunnya laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	dokumen	1	1	3.285.000	1	3.613.500	1	3.974.850	1	4.372.335	1	4.809.569	1		DPMPTS P	DPMP TSP			
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah laporan peningkatan kinerja organisasi yang tersusun	Laporan	-	1	3.285.000	1	3.613.500	1	3.974.850	1	4.372.335	1	4.809.569	1		DPMPTS P	DPMP TSP			
Meningka t nya investasi					Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	%	15	16		16		16		16		16		80		DPMPTS P	DPMP TSP			
	Meningka t nya investor dan penyetr ap an tenaga kerja				Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	investor	-	3		3		3		3		3		15		DPMPTS P	DPMP TSP			
		Program Pengemb angan Nilai Pemasana n Model			Persentase Investor PMA/PMDN	%	100	100	516.178.0 00	100	499.933.0 00	100	384.928.0 00	100	423.420.0 00	100	640.767.0 00	100		DPMPTS P	DPMP TSP			

83

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basis/ ne	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et				Pagu Indikatif						
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota		Persentase Kesuksesan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	%	100	100	12.208.000	100	188.428.000	100	42.272.000	100	46.499.000	100	226.134.000	100		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal		Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM yang ditetapkan	Perda/Perwasi	1	-	0	1	150.000.000	-	0	-	0	1	175.000.000	2		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah perusahaan yang dievaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM nya	Perusahaan	-	2	12.208.000	2	38.428.000	2	42.272.000	2	46.499.000	2	31.134.000	10		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	%	-	20	203.970.000	40	311.505.000	60	342.656.000	80	376.921.000	100	414.613.000	100		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peraturan yang terkait penanaman modal yang tersusun	dokumen	1	4	404.970.000	1	153.967.000	1	169.364.000	1	186.300.000	1	204.930.000	8		DPMP/TSF	DPMP/TSF

84

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Basis/ ne	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2021	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et				Pagu Indikatif
			Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota		Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi yang ditetapkan	dokumen	3	1	99.000.000	1	157.538.000	1	173.292.000	1	190.621.000	1	209.683.000	5		DPMP/TSF	DPMP/TSF
		Program Promosi Penanaman Modal			Persentase LOI yang ditindaklanjuti	%	100	100	23.000.000	100	496.398.000	100	506.676.000	100	705.876.000	100	628.226.000	100		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah kepedulian (LOI)	%	-	10	23.000.000	10	496.398.000	10	506.676.000	10	705.876.000	10	628.226.000	50		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	dokumen	1	1	23.000.000	1	114.248.000	1	87.863.000	1	138.563.000	2	99.613.000	6		DPMP/TSF	DPMP/TSF
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota		Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	kegiatan	0	2	-	4	382.130.000	5	418.813.000	6	567.313.000	6	528.613.000	23		DPMP/TSF	DPMP/TSF
		Program Pengendalian Pelaksanaan PM			Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	%	10	15	82.346.000	20	94.141.000	25	103.555.000	30	113.911.000	35	123.302.000	35		DPMP/TSF	DPMP/TSF

85

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program/Kegiatan	Kegiatan	sub kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	Bazefine	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								2021	Target	Pagu	Targ	Pagu	Targ	Pagu	Targ	Pagu	Targ				Pagu
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	20	50	82.346.000	55	94.141.000	60	103.355.000	65	113.911.000	70	125.302.000	70		DPMPTSP	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal		Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modalnya	perusahaan	40	80	34.264.000	83	41.230.000	85	45.375.000	87	48.913.000	90	34.804.000	425		DPMPTSP	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah pengusaha yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	pengusaha	60	100	30.242.000	100	33.267.000	110	36.593.000	115	40.233.000	120	44.278.000	350		DPMPTSP	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	perusahaan	40	80	17.340.000	83	19.624.000	90	21.587.000	95	23.745.000	100	26.110.000	450		DPMPTSP	DPMPTSP

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Veteran Nomor 7 Telpn.0293-314663, 361775 MAGELANG 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
NOMOR 060/1007/330 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2021-2026 Kota Magelang;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/162/112 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021-2026

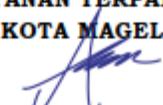
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 1 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG**


MUCHAMAD ABDUL AZIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
 NOMOR 060/1007/330 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAGELANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAGELANG

- Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
 Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan	IKM Pelayanan Perizinan			$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{\{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}}$ dimana : S = jumlah sampel λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 % N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0	83,50	83,50	84,00	84,50	85,00	Hasil Survey Bagian Organisasi atau Pengolahan Data Aplikasi IKM	kepala
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Jumlah jangka waktu pemrosesan izin utk masing masing izin / jumlah izin <i>5 hari untuk SOP Pemrosesan dengan survey</i>	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	Laporan dari Aplikasi Perizinan	kepala
				<i>2 Hari untuk SOP Tanpa survey</i>	2	2	2	2	2	Laporan dari Aplikasi	kepala

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6					7	8	
											Perizinan	
Meningkatnya Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN			Nilai investasi tahun n-Nilai investasi tahun n-1/Nilai investasi tahun n-1x100%	16%	16%	16%	16%	16%	LKPM	kepala	
		Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah Investor Berskala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	3	3	3	3	3	LKPM	kepala	

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG**



MUCHAMAD ABDUL AZIS